

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku dan Jurnal

- Abdul, H. *Akuntansi Sektor Publik - Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat. 2004
- Al-Amin, M. *Manajemen Pengawasan*. Jakarta: Kalam Indonesia. 2006
- Asshiddiqie, J. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2006
- Az, L. S.. *Hukum Pemerintahan Daerah : Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015
- Diantha, I. M. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group. 2017
- Fachrudin, I. *Fungsi Pengawasan Terhadap Aparatur Peradilan untuk Mewujudkan Badan Peradilan yang Agung*. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI. 2012
- Hadikusuma, H. *Metode Pembuatan Kertas kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju. 1995
- Haris, S. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah : Desentralisasi, Demokratisasi, dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah*. Jakarta: LIPI Press. 2005
- Hertogh. *Consequenties van controle : De bestuurlijke doorweking van het oondeel van de administratieve rechter en de Nationale ombudsman*. Den Haag. 1997
- Huda, N. *Hukum dan Pemerintahan*. Bandung: Nusa Media. 2009
- Idrus, M. *Metode Penulisan Ilmu-ilmu Social*. Yogyakarta: UII Press. 2007
- Kaligis, O. *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*. Bandung: PT ALUMNI. 2006
- Lotulung, P. E. *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1993
- Manan, B. *Hubungan antara pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1994
- Manullang. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2006

- Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Kencana Prenada Media Group. 2005
- Nasir, M. S. Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekade Otonomi Daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 34. 2019
- Oktaviana, D. Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya dalam Rangka Otonomi Daerah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 92. 2012
- Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka. 1976
- Renel, R. Y. "PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DI KOTA SEMARANG". *DIPONEGORO LAW JOURNAL*, 8. 2019
- Soekanto, S., & Mamudji, S. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003
- Soekarno. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Mandar Maju. 2002
- Sudaryo, Y.. *Keuangan di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: CV Andi Offset. 2017
- Sugiarto, E. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media. 2019
- Sukanto. *Nafsiologi*. Jakarta: Integritas Press. 1985
- Sulatyawati, D. Hukum Pajak dan Implementasinya Bagi Kesejahteraan Rakyat. *Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, 121. 2014
- Syaffie, I. K. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara. 2003
- Warpani. *Rekayasa Lalu Lintas*. Jakarta: Bhatara Karya Aksara. 1990
- Wulandari, Artha, P., & Iryanie. *Pajak Daerah dalam Pendapatan asli Daerah*. Yogyakarta: Deepublish. 2018
- Yahya, Y. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2006

2. Website

<https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2019/06/Ringkasan-APBD-TA-2017.pdf>.

<https://dprd.semarangkota.go.id/page/sejarah>

https://dprd.semarangkota.go.id/page/alat_pimpinan

3. Peraturan Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Pemusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas

PP Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertang-gungjawaban Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan kedua terhadap Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum

Keputusan DPRD Nomor 172.1/36 Tahun 2018 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi-Komisi DPRD Kota Semarang

Keputusan DPRD Nomor 172.1/35 Tahun 2018 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Pembentukan Perda DPRD Kota Semarang

Keputusan DPRD Nomor 172.1/34 Tahun 2018 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Anggaran DPRD Kota Semarang

Keputusan DPRD Nomor 172.1/33 Tahun 2018 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah DPRD Kota Semarang